

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangka Tengah yang merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia serta menjadikan Indonesia sebagai negara produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Akan tetapi predikat sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia maupun dunia tersebut harus dibayar mahal dengan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut. Terutama dampak terhadap aspek fisik lingkungan seperti kerusakan bentang alam.

Keberadaan tambang timah terdapat dan tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Hingga saat ini masih terdapat beberapa tambang timah yang masih beroperasi baik secara legal maupun ilegal. Namun, ketika aktivitas pertambangan timah tersebut telah usai kebanyakan dari perusahaan maupun penambang membiarkan atau meninggalkan begitu saja galian bekas tambang timah. Meskipun begitu tidak sedikit galian bekas tambang timah tersebut dilakukan reklamasi sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menyadari dan mengingatkan masyarakat bahwa tidak selamanya perputaran ekonomi hanya dapat bergantung dari sektor tambang saja yang mana suatu saat nanti pastinya akan habis serta tidak dapat terbaharukan lagi. Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Bangka Tengah Tahun 2019-2025, semakin menentukan arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangka Tengah yang jelas dan terarah serta menjadi sumber rujukan utama untuk memandu arah pengembangan kepariwisataan yang ada di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebesar 16,33% wilayah pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di Bangka Tengah serta 35% desa di Bangka Tengah berada di wilayah pesisir. Wilayah Pesisir memiliki keunikan, nilai ekonomi tinggi. Lahan pesisir Bangka Tengah yang menyimpan potensi yang sangat besar khususnya pariwisata, jika dikelola dengan baik tentunya akan mampu memberikan manfaat lebih bagi kehidupan masyarakat.

Meskipun 35% desa di Bangka Tengah berada di wilayah pesisir tidak membuat pemerintah daerah hanya berfokus kepada pengembangan pariwisata di wilayah pesisir saja. Selain memiliki pantai yang indah Bangka Tengah juga memiliki aneka potensi wisata lainnya seperti yang ada di Desa Wisata Perlang. Desa Wisata Perlang memiliki beberapa atraksi wisata seperti wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam yang terdapat di Desa Wisata Perlang yang saat ini menjadi salah satu wisata unggulan di Kabupaten Bangka Tengah yaitu Wisata Danau Pading yang merupakan lubang besar bekas tambang timah yang membentuk kawah seperti danau dengan hamparan pasir berlatar belakang perbukitan. Danau Pading sendiri menjadi daya tarik wisata unggulan berkat kesadaran serta kreativitas para pemuda desa setempat yang tinggal di sekitar Danau Pading.

Pada awalnya Danau Pading ini hanyalah tempat bersantai dan tempat mandi para pemuda Desa Perlang. Pengelolaan wisata Danau Pading yang dilatarbelakangi oleh inisiatif dari pemuda sekitar yang mampu melihat potensi wisata pada kolong bekas tambang timah milik PT. Koba Tin yang saat ini sudah tidak beroperasi dan ditinggalkan begitu saja yang berada di lembah Bukit Pading membentuk kawah seperti danau seluas dengan hamparan pasir yang mengelilingi danau tersebut serta memiliki air yang jernih hijau kebiruan dengan latar belakang perbukitan yang kemudian dikelola secara sukarela dengan basis komunitas oleh pemuda Desa Perlang pada 27 Oktober 2020.

Selain Wisata Alam Danau Pading terdapat juga wisata alam pendakian. Bukit Pading menyediakan wisata pendakian dengan ketinggian 677 mdpl yang panjangnya meliputi hampir setengah dari Desa Perlang itu sendiri. Objek wisata alam ini menawarkan pengalaman mendaki yang cukup terjal dan menguras tenaga serta menawarkan pengalaman memandang Danau Pading karena lokasinya tetap berhadapan langsung dengan Bukit Pading yang menjadi latar belakang Danau Pading. Masih terletak di Bukit Pading, Air Terjun Sadap merupakan wisata alam yang menawarkan air terjun dari sebuah mata air yang terletak di Bukit Pading. Objek wisata ini menawarkan pemandangan perbukitan pading yang indah disepanjang perjalanan menuju lokasi Air Terjun Sadap.

Wisata Alam lainnya yang terdapat di Desa Wisata Perlang adalah pantai dan *snorkeling* Di Gusung Perlang. Atraksi yang ditawarkan dimulai dari Pantai Perlang wisatawan juga bisa bermain di bibir pantai dengan memandang dan menikmati indahnya hamparan perkarangan serta Gusung Perlang dari kejauhan sembari menunggu naik ke kapal serta melakukan persiapan. Sesampainya di Gusung Perlang wisatawan dapat menikmati indahnya panorama yang ditawarkan di sekitaran Gusung Perlang. Wisatawan juga dapat melakukan kegiatan *snorkeling* di lokasi yang telah ditentukan. Apabila beruntung wisatawan juga dapat menyaksikan lomba-lomba yang berenang bersamaan dengan lajunya kapal selama dalam perjalanan menuju Gusung Perlang.

Selain dari keempat wisata alam yang ditawarkan. Desa Wisata Perlang juga menawarkan wisata budaya berupa Rumah Adat yang merupakan rumah-rumah adat melayu zaman dulu yang hingga saat ini masih terjaga dan dikelola dengan baik. Atraksi ini menawarkan sensasi menginap di rumah-rumah adat, melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan pemilik rumah seperti masak masakan khas Bangka Belitung, berkebun, mencari ikan, hingga bertambang timah.

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan terjadinya perkembangan pariwisata Desa Wisata Perlang adalah terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang datang secara langsung sehingga nantinya akan dapat diikuti oleh perkembangan sarana serta prasarana penunjang atau pendukung Desa Wisata Perlang. Bersumber langsung dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung hanya terdapat data dari tiga atraksi wisata alam Desa Wisata Perlang yaitu Danau Pading, Gusung Perlang, Air Terjun Sadap yang merupakan unggulan dari Desa Wisata Perlang. Pada tahun 2021 jumlah total dari tiga atraksi wisata menyentuh angka 43.219 orang. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan ketiga atraksi unggulan Desa Wisata Perlang mengalami penurunan sebesar 6.897 orang wisatawan yaitu 36.322 orang. Sedangkan untuk data tahun 2023 belum sepenuhnya terkumpul dikarenakan Disbudparpora Bangka Tengah meminta data per 3 bulan ke pokdarwis terkait. Sedangkan untuk data yang bersumber langsung dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bangka Tengah mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait Desa Wisata Perlang, Disbudparpora Bangka Tengah mengatakan hingga saat ini untuk retribusi belum diberlakukan dikarenakan memang PERDA terkait baru disahkan pada awal tahun 2023 dan itu juga baru diberlakukan penarikan retribusinya untuk destinasi wisata Pantai Tapak Antu dan Pantai Sumur 7 saja.

Saat ini basis komunitas pemuda Desa Perlang yang mengelola Danau Pading sudah tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata Perlang Linau Mentari (Pelintar) yang merupakan satu dari banyaknya pokdarwis yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Baik dalam pengelolaan hingga pengembangan Desa Wisata Perlang tentunya diperlukan keterlibatan serta menjalani kerjasama yang baik antara jaringan baik yang terbentuk dari hubungan antara individu ataupun antar institusi kelembangaan.

Dengan begitu peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana kolaborasi yang ada antara *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Perlang yang diharapkan dapat membantu memberikan masukan terkait dengan *collaborative governance* serta faktor-faktor dalam pengembangan desa wisata berbasis kemasyarakatan yang tidak menutup kemungkinan terdapat di daerah maupun desa wisata lainnya. Karena seperti yang diketahui dalam pengembangan desa wisata tentunya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja sehingga perlu adanya kolaborasi yang bersifat membangun serta dapat melibatkan banyak pihak dalam upaya peningkatan ekonomi daerah melalui sektor kepariwisataan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat di buat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2023?**
- 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022-2023?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* antara pihak-pihak yang berkaitan dalam mengembangkan Desa Wisata Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa informasi bagi akademisi yang tertarik akan pengembangan pariwisata, khususnya desa wisata dalam upaya melakukan pengembangan dan kolaborasi. Tentunya juga penelitian ini diharapkan

sangat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa Ilmu Pemerintahan, khususnya sebagai bahan referensi dalam bidang tata kelola pariwisata berbasis *collaborative governance* serta dapat mengetahui faktor-faktornya baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Desa Perlang, khususnya yang berada di sekitar lingkup kawasan Desa Wisata Perlang dalam menambah wawasan mengenai pentingnya kolaborasi dalam pengembangan desa wisata agar senantiasa dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di sekitarnya secara berkelanjutan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Adapun tinjauan pustaka atau literature review dari penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu:

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Temuan</b>
1.	Dory Gurvantry, Andres Febriansah, Junus Tampubolon (2022)	Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata E kang di Kabupaten Bintan) Publikasi Journal of Public Administration Studies	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dalam pengelolaan daya tarik wisata terutama menghadapi tantangan untuk mengubah pola pikir masyarakat tradisional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa stakeholder kepariwisataan masih tidak memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan desa wisata, serta kurangnya koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, pokdarwis, dan masyarakat.
2.	Nur Ambia Arma (2023)	Collaborative Governance dalam Pengembangan Smart Village Desa Pangandaran Publikasi Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik	Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapatnya konsep collaborative governance pentahelix. Hal tersebut disebabkan karena dalam membangun Smart Village di Desa Pangandaran, akademisi tidak dilibatkan didalamnya. Sedangkan stakeholder yang terlibat dalam pengembangannya hanyalah pihak pemerintah yaitu Kementerian Desa dan Pemerintah Desa, pihak swasta yaitu PT. Telkom Indonesia, Masyarakat Desa Pangandaran, dan media massa.
3.	Putu Nomy Yasintha (2020)	Collaborative Governance dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar Publikasi Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial	Hasil penelitian menunjukan kecenderungan bahwa pengelolaan Kebun Raya Tematik Gianyar saat ini hanya mengandalkan dukungan dari pemerintah, tanpa memberikan kontribusi yang signifikan dari sektor swasta. Selain itu, belum ada peraturan yang tegas dari

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			pihak desa adat, sehingga peran masyarakat dalam pengelolaan Kebun Raya Tematik Gianyar masih belum terdefinisi dengan baik.
4.	Dwi Alamsyah, Nuryanti Mustari, Rudi Hardi, Ansyari Mone (2020)	Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa Kamiri Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Publikasi Jurnal Ilmu Sosial dan Politik	Hasil penelitian menunjukkan dalam proses kolaborasi yang dilakukan sudah cukup baik terutama dalam upaya mengembangkan wisata edukasi di Desa Kamiri yang telah melalui tahapan-tahapan dalam proses collaborative governance seperti face to face, trust building, commitment to process, dan share understanding .
5.	Hasan Ismail, Eddy Wahyudi, Anggraeny Puspaningtyas (2023)	Collaborative Governance dalam Pembangunan Inklusif Wisata Publikasi Jurnal Kebijakan Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Wisata Pantai Delegan, pembangunan inklusif telah terwujud dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah dalam proses pembangunannya. Meskipun semua pihak yang terlibat telah merasakan manfaat dari wisata ini, namun masih ada kekurangan terutama dalam hal inovasi pengembangan wisata yang menyebabkan penurunan kunjungan wisata.
6.	Muhammad Ali, Amil, Zulhadi (2018)	Implementasi Kebijakan Collaborative Governance dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara Publikasi Jurnal Ulul Albab	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan collaborative governance dalam tata kelola kawasan pariwisata terutama pada badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi dengan dampak yang cukup besar terhadap pengembangan serta kemajuan sektor pariwisata di daerah. Hal

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan serta tamu yang datang serta menginap di penginapan maupun hotel yang berada di Lombok Utara dari tahun ke tahun.
7.	Bayu Priambodo (2022)	Proses Pengembangan Pariwisata di Kota Surabaya Antara Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Perspektif Tata Kelola Kolaboratif Publikasi Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara Kota Surabaya dan pihak terkait lainnya menjadi masalah yang mencolok. Hal ini dapat diamati dari fakta bahwa pemerintah memiliki dua lembaga promosi pariwisata yang beroperasi secara terpisah. Bahkan, masyarakat tidak terlibat dalam proses pengembangan pariwisata, sehingga mereka tidak tahu kapan proyek pembangunan akan dimulai di daerah mereka. Selain itu, perusahaan swasta yang bertindak sebagai pengembang tidak melibatkan masyarakat lokal sebagai pekerja atau karyawan dalam proyek tersebut.
8.	Faturachman Alputra Sudirman, Irma Tri Annisya Tombora, La Tarifu (2022)	Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi Indonesia Publikasi Journal of International Relations	Hasil penelitian menemukan bahwa dalam proses tata kelola kolaboratif pengembangan pariwisata di Bajo Mola dinilai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dilibatkannya berbagai aktor negara dan non negara seperti British Council, Bank Mandiri, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wakatobi, serta masyarakat dan Lembaga Pengelola Wisata Bajo Mola. Semua tersebut dapat tercapai dengan diawali adanya dialog tatap muka, membangun

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			kepercayaan dari seluruh pihak yang terlibat sehingga dapat memperoleh hasil berupa meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha wisata, pengelolaan sampah, dan peningkatan dari sektor pendapatan masyarakat yang ada di Desa Bajo Mola Wakatobi.
9.	Kedasi Silayar, Ika Sartika, Deti Mulyati (2021)	Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula Publikasi Jurnal Renaissance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 dimensi konsep collaborative governance yaitu network structure, commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, access to authority, distributive accountability/responsibility, information sharing, dan access to resources. Selain itu masing-masing dari aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula memiliki perannya tersendiri setiap stakeholdernya dalam pengembangan pariwisata. Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula, pengusaha pariwisata, tokoh masyarakat, serta masyarakat.
10.	Imma Salistya Sari, Agustina Kustulasari (2020)	Analisis Network Learning dalam Pariwisata Berkelanjutan: Studi Kasus Desa Wisata Pulesari Publikasi Jurnal Nasional Pariwisata	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pihak eksternal yang memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan Desa Wisata Pulesari. Masyarakat sekitar yang melakukan pengelolaan secara mandiri semakin membuat desa memiliki kebebasan dalam membuat

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			<p>maupun menentukan keputusan namun akan cenderung lamban dalam pengembangannya. Hal tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan terutama dalam pengelolaan. Maka dari itu diperlukannya pihak-pihak yang bekerjasama membentuk jejaring sehingga mampu mempengaruhi satu sama lain yang secara langsung akan menimbulkan network learning sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang akan semakin masif serta menstimulasi lahirnya inovasi.</p>
11.	Dwi Hastutik, Dwiningtyas Padmaningrum, Agung Wibowo (2021)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Publikasi Jurnal of Agricultural Extension	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terbentuknya Desa Wisata Ponggok yang dikembangkan oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan tim selam, tim SAR, serta perguruan tinggi dalam upaya melakukan kegiatan pemetaan serta penggalian potensi wisata. Hingga pada tahun 2009 terbentuknya BUMDes Tirta Mandiri yang melanjutkan pengelolaan Desa Wisata Ponggok hingga saat ini. Dalam hal ini BUMDes memiliki peran seperti penyadaran (conscientization), pengorganisasian masyarakat (community organizing), serta peran penghantaran sumber daya manusia (resource delivery).</p>
12.	Haniek Listyorini, Aurilia Triani Aryaningtyas, Gana Wuntu, Renny	Merintis Desa Wisata, Menguatkan Kerjasama Badan Usaha Milik Desa dan Kelompok Sadar Wisata Publikasi	<p>Hasil penelitian menunjukkan telah terjadinya pemahaman akan tupoksi dengan jelas antara tugas kelompok sadar wisata dan badan usaha milik desa, sehingga dapat berkolaborasi serta bersinergi</p>

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Temuan
	Aprilliyani (2021)	Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat	sehingga dapat saling mendukung. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kemampuan dalam mengelola paket wisata berbasis kerja sama antar kelompok masyarakat dan pengelola desa wisata antara kelompok sadar wisata, badan usaha milik desa, dan kelompok-kelompok masyarakat.
13.	Ela Syahrani Dayanti (2020)	TATA KELOLA DESA WISATA BERBASIS MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE	Hasil penelitian dilapangan terkait tata kelola desa wisata berbasis masyarakat dalam perspektif collaborative governance antara pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dengan para stakeholder yaitu Bank BCA dan masyarakat telah melakukan 4 proses kolaborasi dalam tata kelola Desa Wisata Terong. Proses tersebut yaitu dengan starting condition atau yang dikenal dengan tahap awal, kepemimpinan fasilitatif, desain intitusional, serta proses kolaborasi dalam tata kelola Desa Wisata Terong telah dijalankan oleh semua pihak maupun aktor stakeholder dengan berjalan dengan baik pengelolaannya.
14.	Khusnul Khatimah (2019)	KOLABORASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA PULESARI DI DESA WONOKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah Desa Wonokerto dan masyarakat Pulesari telah berjalan dengan sukses. Pemerintah Desa Wonokerto bertindak sebagai fasilitator dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan SDM, dan promosi. Sementara itu, Masyarakat Pulesari bertugas mengelola Desa

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			<p>Wisata Pulesari dan menyediakan layanan pariwisata secara langsung. Kedua belah pihak telah bersama-sama merumuskan visi bersama dan aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan pariwisata serta pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulesari. Selain itu, komitmen terhadap tujuan bersama telah ditegaskan oleh kedua pihak, dan kepercayaan antar mereka terjaga dengan baik. Selain itu, tanggung jawab telah dibagi dengan adil dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek, serta informasi yang relevan dengan mudah diakses oleh semua pihak melalui media sosial, situs web, dan forum komunikasi desa.</p>
15.	Dimas Adi Putra (2018)	COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA PINDUL	<p>Hasil penelitian menunjukkan terkait dengan tingkat keberhasilan kolaborasi, meskipun beberapa indikator sudah terpenuhi, seperti yang diukur oleh indikator yang ada, masih terdapat beberapa aspek yang belum berjalan dengan lancar dalam pelaksanaannya. Ini termasuk kurangnya komitmen terhadap tujuan bersama, tingkat kepercayaan yang kurang di antara para pemangku kepentingan, dan kendala akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, disarankan untuk merancang kebijakan yang dapat mengkoordinasikan</p>

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Temuan
			<p>semua pihak yang terlibat sehingga kolaborasi dapat berlangsung harmonis dan mencapai tujuan bersama. Selain itu, pentingnya kepercayaan dari setiap pihak dalam kolaborasi ini juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah sebaiknya turut berperan dalam menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kolaborasi dalam pengelolaan Goa Pindul berjalan dengan efisien dan optimal.</p>

Berdasarkan tinjauan pustaka pada tabel 2.1 tersebut dapat diketahui bahwa semua peneliti cenderung lebih menganalisis mengenai bagaimana pembangunan maupun pengembangan pariwisata khususnya desa wisata berbasis *collaborative governance*, namun belum ada peneliti yang membahas tentang *collaborative governance* antara pokdarwis dan pemma dalam pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan dalam upaya mengkaji *collaborative governance* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Perlang secara berkelanjutan.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Collaborative Governance**

Kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja bersama dengan orang lain. Ini mengimplikasikan aktor - individu, kelompok, atau organisasi - bekerja sama dalam suatu usaha. Para peserta "berkolaborasi" dengan orang lain dengan syarat dan kondisi yang, seperti yang kita ketahui, bisa sangat bervariasi. Kata "kolaborasi" awalnya mulai digunakan pada abad kesembilan belas saat industrialisasi berkembang, organisasi yang lebih kompleks muncul, dan pembagian kerja dan tugas meningkat. Ini adalah norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, bantuan saling, dan kemudian, manajemen ilmiah dan teori organisasi hubungan manusia (O'Flynn & Wanna, 2008).

Menurut CIFOR/PILI dalam (Haryono, 2012) kolaborasi dijelaskan sebagai wujud kerjasama antara berbagai unsur elemen yang terkait, termasuk individu, lembaga, dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung menerima akibat dan manfaat. Serta terdapat nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi kolaborasi, seperti memiliki tujuan yang sama, kesamaan pemahaman, keterbukaan untuk proses bersama, saling memberikan kontribusi, integritas, empati, dan berfokus pada kepentingan bersama.

Menurut Zadek dalam (Yasinthia, 2020) pemerintah kolaboratif adalah kemitraan publik – swasta, dimana pada dasarnya merupakan inisiasi kolaboratif antara negara dan non – negara, aktor komersial dan *non – profit* yang lahir dari partisipasi pragmatisme. Kolaborasi tersebut merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa pihak yang kemudian disatukan pada suatu pandangan atau tujuan yang sama secara nyata. Hal ini menjadikan sistem pemerintahan kolaboratif memiliki peranan tersendiri antar elemen didalamnya.

*collaborative governance* merupakan suatu model, dimana dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak dapat dengan mandiri mengelola daerahnya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan publik (Gurvantry et al., 2022). Studi kolaborasi antara pemangku kepentingan yang pada akhirnya kita sebut sebagai pemerintah

kolaborasi (*collaborative government*), menyiratkan bahwa pemerintah bekerja antara berbagai pemangku kepentingan, lembaga dan bahkan warga negara untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik bagi semua orang (Yasintha, 2020).

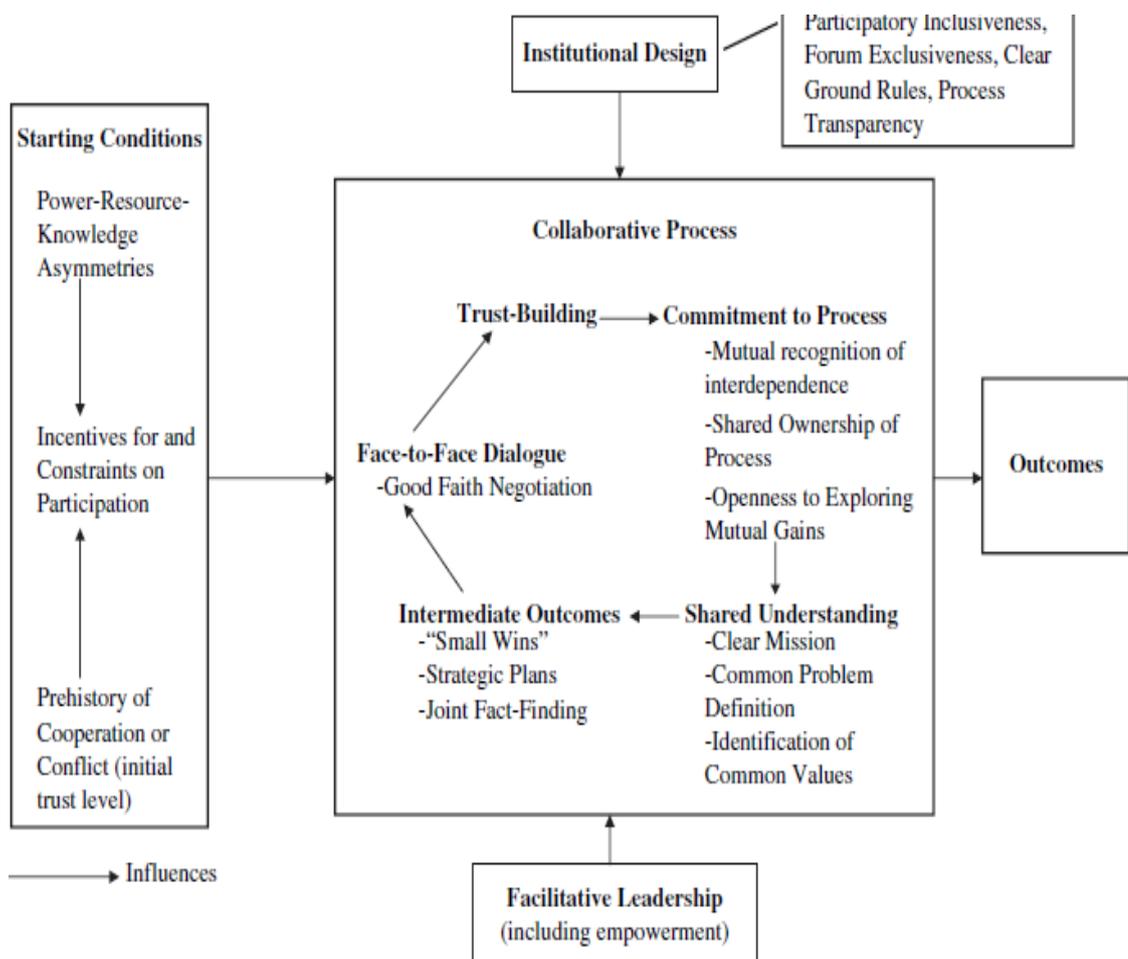
Sedangkan menurut Ansell dan Gash (2008:544) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai berikut: (sebuah pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga pemerintah secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negeri dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan bersifat deliberatif, dan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik).

Hal tersebut lebih menitikberatkan pada enam kriteria penting dalam mendefinisikan *collaborative governance*. Pertama, forum ini dimulai oleh badan-badan atau institusi publik. Kedua, peserta dalam forum termasuk aktor yang bukan dari negara. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan tidak hanya menjadi objek "konsultasi" oleh badan-badan publik. Keempat, forum ini memiliki struktur formal dan pertemuan kolektif. Kelima, tujuan dari forum ini adalah mencapai keputusan melalui konsensus (meskipun konsensus mungkin tidak selalu terjadi dalam praktik). Keenam, kolaborasi ini terfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik. Ini merupakan definisi yang lebih ketat dibandingkan dengan yang sering ditemukan dalam literatur.

Alasan saya menggunakan teori collaborative governance Ansell dan Gash dikarenakan teori tersebut memiliki relevansi konsistensi dengan tujuan penelitian serta topik penelitian yang saya ambil. Selain itu model pada teori collaborative governance Ansell dan Gash terutama proses collaborative governance lebih mempermudah saya dalam memahami lebih secara seksama mengenai fenomena yang sedang diteliti.

**Gambar 1. 1**

**Model Collaborative Governance**



Sumber: Ansell dan Gash (2008:55)

#### A. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

*Starting condition* merupakan situasi awal yang terjadi pada tahap awal kolaborasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam memfasilitasi atau menghambat kerja sama antara pemangku kepentingan atau lembaga dengan pemangku kepentingan. Setiap aktor dalam kolaborasi ini memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan hubungan yang tidak seimbang. Ada tiga faktor kunci dalam kondisi awal yang menjadi titik kritis, yaitu ketidakseimbangan kekuasaan atau sumber daya, insentif untuk berpartisipasi, serta sejarah antagonisme dan kerjasama.

#### B. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Aspek kepemimpinan memegang peran krusial dalam menjalankan kerja sama antara pemerintah dan non-pemerintah. Terutama saat ada kelemahan dalam insentif untuk berpartisipasi, ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan sumber daya, serta tingginya konflik. Jenis kepemimpinan yang dibutuhkan mungkin berbeda tergantung pada situasi yang spesifik. Semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan di antara pemangku kepentingan, semakin penting peran kepemimpinan sebagai mediator yang jujur.

#### C. *Institutional Design* (Desain Institusional)

*Institutional design* di sini mengacu kepada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi. Menjadikan proses kolaboratif paling krusial untuk menekankan bahwa pemerintah perlu menjalankan kolaborasi dengan transparan dan inklusif.

#### D. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Model *collaborative process* menggambarkan kolaborasi sebagai sesuatu hal yang berkembang secara bertahap. Menurut Gray dalam Ansell dan Gash (2008:557) “*defines a three-step collaborative process: (1) problem setting, (2) direction setting, and (3) implementation*” (mendefinisikan tiga tahapan kolaborasi antara lain: penentuan masalah, penentuan tujuan dan implementasi).

Berdasarkan kajian literature yang dikaji menyatakan bahwa proses kolaboratif ini menjadi sulit karena sifatnya yang tidak linear. Namun, hal ini menjadi lebih kompleks karena masukan dari kolaborasi awal dapat memiliki dampak positif atau negatif pada kolaborasi selanjutnya. Dalam menentukan titik awal untuk menjelaskan proses kolaboratif juga menjadi sebuah tantangan yang tidak mudah. Mengingat bahwa komunikasi adalah elemen kunci dalam kolaborasi maka tahapan-tahapan dari kolaborasi dimulai dari.

##### 1. *Face-to-Face Dialogue* (dialog tatap muka)

Pada tahapan dialog tatap muka yang terjadi antara para pemangku kepentingan yang terlibat, diharapkan akan dapat terbangun rasa kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama serta komitmen terhadap jalannya kerjasama yang direncanakan dan dijalankan. Kehadiran percakapan langsung merupakan langkah awal yang krusial dalam kolaborasi. Tanpa adanya interaksi langsung pada awal proses

kolaborasi, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam jalannya kolaborasi tersebut.

2. *Trust Building* (membangun kepercayaan)

Pada dasarnya kepercayaan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kolaborasi karena bukan hanya sekedar tentang kesepakatan atau perundingan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Kepercayaan tidak dapat dibangun secara instan, tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena keberadaannya sangat vital untuk menentukan kesuksesan jangka panjang dari proses kolaborasi.

3. *Commitment to the Process* (komitmen pada proses)

Pada tahapan proses dalam mengembangkan keyakinan bahwa negosiasi adalah metode terbaik untuk mencapai kebijakan yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, melibatkan komitmen yang jelas, adil, dan transparan dari semua pihak yang terlibat.

4. *Share Understanding* (berbagi pemahaman)

Pada suatu titik dalam sebuah proses kolaboratif, para pemangku kepentingan memerlukan pengembangan proses untuk mencapai pemahaman bersama tentang apa yang telah dicapai secara kolektif. Pemahaman bersama ini juga merujuk pada upaya untuk menyamakan pemahaman terkait pengetahuan yang diperlukan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi.

## 5. *Intermediate Outcomes* (hasil sementara)

Pada tahap ini, tujuan utama adalah mencapai kesepakatan mengenai hasil akhir yang diinginkan dalam kolaborasi. Proses perencanaan dan penyusunan hasil akhir diharapkan dapat memperkuat kepercayaan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

## 2. Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan desa wisata merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam upaya mengembangkan desa-desa yang memiliki suatu potensi, baik potensi wisata alam, budaya, maupun sejarah yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Pengembangan desa wisata juga bertujuan agar dapat mengubah desa menjadi tujuan pariwisata dengan menggabungkan pesona alam dan budayanya, menyediakan fasilitas umum pariwisata yang baik serta memastikan aksesibilitas bagi prasarana dan sarana yang memadai dengan tetap menjaga tata cara dan tradisi hidup masyarakat desa. Pengembangan desa wisata juga merupakan salah satu langkah terpadu dalam bentuk percepatan pertumbuhan dan perubahan dalam mendorong transformasi pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi di desa.

Menurut Pitana dalam (Winarta, 2020) konsep pengembangan desa wisata merupakan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan dan pembangunan desa wisata sangat penting karena dapat menghasilkan

berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun merugikan warga sendiri. Bagi masyarakat, perkembangan desa pariwisata membawa manfaat yang signifikan dalam hal ekonomi, budaya, dan lingkungan, tetapi terkadang juga menghadirkan kerugian. Meskipun ada potensi manfaat ekonomi, pengelolaan yang tidak optimal atau kurang efektif dapat menimbulkan kerugian. Dalam merencanakan pengembangan pariwisata, penting untuk memiliki rencana yang komprehensif yang memperhitungkan aspek ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Setiap perencanaan harus mempertimbangkan dan mengidentifikasi dengan jelas potensi dampak negatif yang mungkin muncul, terutama yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan aspek sosial budaya di wilayah setempat

Menurut (Fitriana, 2017) terdapat beberapa komponen utama dalam pengembangan desa wisata diantaranya sebagai berikut:

1. Atraksi

Atraksi pada dasarnya merujuk kepada kegiatan dari seluruh aspek kehidupan penduduk setempat beserta latar lokasi desa yang memungkinkan dapat berintegrasinya wisatawan untuk terlibat secara aktif. Mencakup berbagai hal berupa seni, budaya warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa dan lain-lainnya yang dapat menjadi daya tarik wisata. Selain itu atraksi dapat memberikan ciri khas pada daerah yang mendasari minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut.

## 2. Akomodasi

Akomodasi pada dasarnya merupakan hal yang wajib dalam penyediaan akomodasi berupa homestay, pelayanan dan penyediaan fasilitas umum, terutama pada desa wisata merupakan sebagian dari tempat yang ditinggal oleh para penduduk setempat atau struktur yang berkembang atas ide konsep tempat tinggal penduduk.

## 3. Masyarakat

Masyarakat dalam pengembangan desa menjadi desa wisata tentunya harus memiliki masyarakat didalamnya yang mana memiliki peran atau berpartisipasi terutama dalam pengembangan desa wisata.

## 4. Infrastruktur

Infrastruktur dalam pengembangan desa wisata hal ini memiliki peranan yang sangat penting baik berupa akses yang baik sehingga dapat mempercepat menuju desa wisata.

## 5. Fasilitas pendukung pengembangan desa wisata

Fasilitas yang dimaksud dapat berupa jaringan telekomunikasi serta fasilitas penunjang seperti penginapan, kamar mandi dan toilet yang bersih dan memadai sehingga dapat menunjang kenyamanan wisatawan yang ingin berkunjung.

## 6. Mitra kerjasama

Mitra kerjasama dalam hal ini mitra sejatinya komponen yang paling penting terutama dalam pengembangan desa wisata. Hal ini dikarenakan mitra dapat membantu secara masif dalam pengembangan sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Mitra kerjasama dapat terjadi antara lembaga atau institusi lainnya maupun swasta.

Selain komponen utama dalam melakukan pengembangan desa wisata, desa wisata juga harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kelembagaan desa wisata

Dalam pengembangan desa wisata, perlu adanya perencanaan awal yang cermat, terutama dalam menentukan pembentukan kelompok sadar wisata yang nantinya akan menjadi pengelola dari desa wisata. Selain itu perlu adanya kegiatan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan desa wisata.

2. Memiliki objek serta daya tarik wisata

Dalam pengembangan desa wisata perlu adanya perencanaan yang baik dan visioner dari pemerintah maupun pengelola desa wisata dalam melakukan inovasi pada objek yang menjadi daya tarik dalam desa wisata. Hal ini diperlukan agar nantinya para wisatawan tidak mudah bosan dan mampu mempromosikan secara langsung maupun tidak langsung terutama dalam perkembangan dari pengembangan desa wisata.

3. Memiliki sarana dan prasarana

Dalam pengembangan desa wisata tentunya diperlukan pembangunan serta berkelanjutan terutama dalam sarana dan prasana yang menunjang desa wisata. Hal ini tentunya diperlukan peran pemerintah yang dapat mengarahkan serta memfasilitasi sarana prasarana yang ada di desa wisata.

Menurut Adida & Pujiani dalam (Prihastha, 2020a) dalam pengembangan desa wisata juga tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam perencanaan desa wisata sebagai berikut:

1. Memperhatikan karakteristik lingkungan setempat desa wisata.
  2. Meminimalisir dampak negatif yang akan ditimbulkan di kawasan desa wisata.
  3. Menggunakan materi yang sesuai dengan keadaan lingkungan setempat desa wisata.
  4. Memanfaatkan bahan-bahan digunakan yang ramah lingkungan serta dapat di daur ulang.
  5. Melibatkan masyarakat setempat atau sekitar desa wisata dalam pembangunan serta pengembangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi desa wisata.
3. Desa Wisata

Desa wisata merupakan hasil dari proses dan dinamika masyarakat setempat yang memiliki ciri khas yang tidak bisa ditemukan di desa-desa lainnya (Aji & Zaenuri, 2018). *“a tourism village is the development of a village in form of integration of attraction, accommodation, and the supporting facilities presented in the structure of life of a community”*

(sebuah desa pariwisata merupakan pengembangan sebuah desa dalam bentuk integrasi daya tarik, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat) (Astawa et al., 2018).

Menurut Nuryanti dalam Irfan dan Suryani (2017:75) desa wisata adalah bentuk integrasi antara objek wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan peraturan dan tradisi. Sedangkan desa wisata dalam konteks wisata pedesaan adalah aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut (Sudibya, 1970).

Merujuk kepada definisi desa wisata diatas, desa-desa yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata tentunya akan memberikan contoh yang baik secara langsung maupun tidak langsung terutama bagi desa-desa lainnya, dalam penetapan suatu desa dalam mejadikannya sebagai desa wisata tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan seperti.

1. Memiliki Aksesibilitas

Memiliki aksesibilitas yang baik tentu wajib dimiliki suatu desa yang ingin menjadikan desanya sebagai desa wisata. Dengan memiliki aksesibilitas yang baik seperti jalan yang bagus, jarak yang relatif tidak jauh untuk ditempuh, akses keluar masuk yang baik tentunya akan

mempermudah para wisatawan untuk mengunjungi desa wisata dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.

2. Memiliki Objek-Objek

Memiliki objek-objek yang menarik merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh suatu desa wisata. Desa yang memiliki potensi berupa keindahan alam, adat istiadat, seni budaya, legenda, makanan khas lokal, dan sebagainya yang mana potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi objek-objek wisata yang menarik para wisatawan untuk mengunjungi desa wisata.

3. Mendapatkan Dukungan dari Masyarakat dan Aparat Desa

Mendapatkan dukungan baik secara materi dan moral dari masyarakat dan aparat desa tentunya menjadi suatu modal yang besar dari langkah yang besar untuk memenuhi persyaratan dalam mengembangkan desa menjadi desa wisata. Masyarakat dan aparat desa yang menerima serta memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata tentunya akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke desa wisata.

4. Menjamin Keamanan Desa

Menjamin keamanan desa tentunya menjadi suatu penentu bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke desa wisata dengan aman dan nyaman. Hal tersebut dikarenakan keamanan menjadi suatu keharusan yang dimiliki suatu desa wisata dalam mendukung memenuhi persyaratan untuk menjadi desa wisata.

5. Ketersediaan Akomodasi

Dengan menjamin ketersediaan akomodasi baik telekomunikasi, tempat menginap maupun beristirahat, penyediaan fasilitas serta layanan yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas dan ramah menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mendukung menjadi suatu desa wisata.

6. Memiliki iklim yang baik

Dengan memiliki iklim yang baik seperti sejuk dan dingin tentu akan membuat wisatawan menjadi betah dan nyaman saat berkunjung ke desa wisata. Faktor ini juga dapat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata.

7. Memiliki hubungan dengan objek wisata lainnya

Dengan memiliki keterhubungan antara objek wisata dengan objek wisata lainnya yang sudah dikenal oleh wisatawan tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke desa wisata.

Selain harus memenuhi persyaratan untuk menjadi desa wisata hal yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu terdapat 2 konsep penting dalam suatu komponen desa wisata sebagai berikut.

1. Akomodasi

Akomodasi merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi desa wisata. Sebagai bagian dari struktur dari desa yang berkembang dalam konsep desa wisata, yang terdiri dari tempat tinggal para penduduk desa wisata setempat atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat

tinggal penduduk tentunya menjadi konsep penting dalam suatu komponen desa wisata.

## 2. Atraksi

Atraksi merupakan suatu komponen penting yang harus dimiliki suatu desa wisata. Dengan integrasi aktif wisatawan dalam kehidupan sehari-hari para penduduk setempat, bersama dengan latar desa yang memfasilitasi interaksi ini. Para wisatawan selaku partisipasi aktif dapat melakukan aktifitas masyarakat desa, mengikuti kebudayaan, adat istiadat desa, dan lainnya yang lebih spesifik.

Desa wisata yang menjadikan desanya sebagai desa wisata tentunya memiliki tujuan seperti.

1. Dalam mendukung program dari pemerintah terutama dalam pembangunan kepariwisataan dengan menyediakan atau membangun objek wisata alternatif yang saling berhubungan.
2. Dalam mendukung serta menggali potensi desa yang dapat dijadikan desa wisata untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sekitar desa wisata.
3. Dalam mendukung perluasan lapangan pekerjaan serta lapangan berusaha bagi penduduk desa wisata yang mana dapat secara langsung meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat sekitar desa wisata. Dengan demikian akan terjadinya pemerataan pembangunan terutama pembangunan ekonomi di desa wisata.

4. Dalam mendorong orang-orang yang tinggal di perkotaan yang secara ekonomi lebih relatif baik dari pada yang berada di desa, agar dengan senang dan mudah untuk berekreasi ke desa wisata.
5. Dalam menimbulkan rasa bangga terutama bagi penduduk desa yang desanya dijadikan desa wisata untuk tetap menetap di desanya, dalam upaya mengurangi urbanisasi bagi penduduk desa.
6. Dalam mempercepat pembauran antara penduduk pribumi dengan orang-orang non pribumi yang mengunjungi desa wisata.
7. Dalam memperkuat serta memperkokoh persatuan bangsa sehingga dapat mengatasi disintegrasi antar masyarakat.

## **G. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan suatu definisi yang masih berupa konsep dengan maknanya yang sangat masih abstrak meskipun secara intuitif masih dapat bisa dipahami maksudnya.

### *1. Collaborative Governance*

*Collaborative Governance* merupakan suatu kondisi dimana pemerintah dalam memenuhi tujuan publik melalui suatu kolaborasi antar suatu lembaga, organisasi, individu, maupun swasta dan masyarakat.

### *2. Pengembangan Desa Wisata*

Pengembangan desa wisata merupakan suatu proses baik dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan yang meliputi

kegiatan dalam upaya meningkatkan potensi pariwisata yang terdapat di suatu desa.

### 3. Desa Wisata

Desa wisata merupakan sebuah konsep dalam pengembangan wilayah pedesaan yang memiliki potensi pariwisata yang memiliki daya tarik alam, budaya, dan tradisional.

## H. Definisi Operasional

Dalam penelitian untuk memberikan suatu pemahaman agar dapat memudahkan penelitian, maka akan disajikan dalam beberapa bentuk indikator berdasarkan dari teori yang digunakan, hal ini juga untuk mempermudah melihat bagaimana peran masing-masing *stakeholder* terutama pada proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022-2023.

Teori *collaborative governance* yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash dikarenakan teori tersebut memiliki relevansi konsistensi dengan tujuan penelitian serta topik penelitian yang saya ambil. Selain itu model pada teori *collaborative governance* Ansell dan Gash terutama proses *collaborative governance* lebih mempermudah saya dalam memahami lebih baik fenomena yang saya teliti.

**Tabel 1. 2**

**Indikator Collaborative Governance**

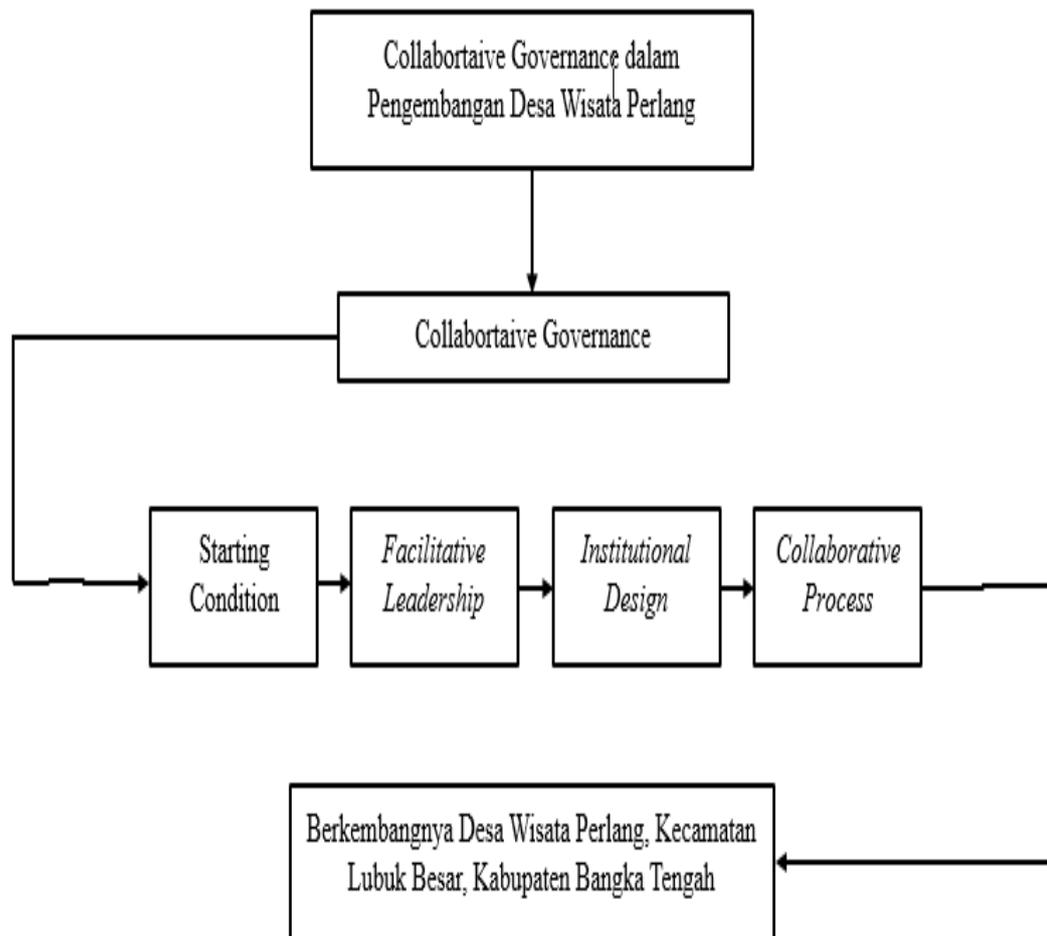
<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
<i>Starting Condition</i> (Kondisi Awal)	a. Keterkaitan pihak <i>stakeholder</i> terkait
<i>Facilitative Leadership</i> (Kepemimpinan Fasilitatif)	a. Manajemen yang baik dalam proses kolaborasi b. Pengelolaan kemampuan dalam melaksanakan kredibilitas teknis c. Memastikan bahwa kolaborasi diberdayakan dalam upaya membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua pihak
<i>Institutional Design</i> (Desain Institusional)	a. Pemerintah yang harus terbuka serta inklusif
<i>Collaborative Process</i> (Proses Kolaborasi)	a. <i>Face-to-Face Dialogue</i> (Dialog tatap muka) b. <i>Trust Building</i> (Membangun Kepercayaan) c. <i>Commitment to the Process</i> (Komitmen terhadap proses) d. <i>Share Understanding</i> (Berbagi Pemahaman) e. <i>Intermediate Outcomes</i> (Hasil sementara)

## I. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan untuk mempermudah alur berpikir dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022-2023. Selain itu, untuk mengetahui faktor-faktor baik pendukung maupun penghambat dalam pengembangan Desa Wisata Perlang.

**Gambar 1. 2**

### **Kerangka Berpikir**



## **J. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi dan deskripsi yang dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh selama kegiatan lapangan. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan antara pengumpulan data dan analisis data. Keduanya berlangsung secara simultan, membentuk suatu siklus interaktif, bukan proses yang berjalan secara linier (Rijali, 2019).

Sedangkan menurut Abdussamad (2021) penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian di bidang ilmu sosial yang mengadopsi paradigma alamiah, dengan mengandalkan teori seperti fenomenologi, serta pendekatan sejenisnya. Tujuan utamanya adalah untuk menyelidiki isu-isu sosial di dalam suatu wilayah dengan cara yang komprehensif, dengan mempertimbangkan latar belakang dan sudut pandang menyeluruh terhadap objek penelitian.

Dengan demikian peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Peneliti berupaya untuk menguraikan objek dan fokus penelitian dengan mengumpulkan data yang relevan dari lapangan. Data yang diberikan oleh informan dikumpulkan, dianalisis, dan hasil analisisnya dapat berupa deskripsi yang kemudian diinterpretasikan, menghasilkan laporan tertulis sebagai output akhir.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini merupakan Desa Wisata Perlang yang terletak di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi ini dipilih untuk mempermudah peneliti dalam mencari data dan menemui pihak terkait dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian. Adapun data primer yang dibutuhkan peneliti untuk bisa mendapatkan data terkait secara langsung dan resmi yaitu dengan melakukan wawancara serta mengajukan pertanyaan kepada sumber yang telah ditetapkan seperti Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Desa Perlang, Ketua Badan Usaha Milik Desa Perlang, Ketua Kelompok Sadar Wisata Perlang Lintang Mentari, dan Masyarakat Desa Perlang.

### b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari keterangan maupun informasi-informasi yang secara tidak langsung yang mencakup hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan maupun artikel jurnal.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung ke lokasi objek penelitian yang telah ditentukan guna mengamati dan mengetahui lebih jelas secara langsung. Fokus observasi nantinya akan berkembang selama kegiatan sedang berlangsung

##### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber terkait guna memperoleh data dari narasumber. Selama proses wawancara selain mendengarkan dan menulis, peneliti juga dapat menyertakan dokumentasi berupa foto maupun rekaman selama kegiatan wawancara berlangsung. Diharapkan nantinya yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kelompok Sadar Wisata Perlang Linau Mentari (Perlinter), dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

##### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi yang bersumber dari dokumen, arsip dan gambar yang terdapat pada lokasi penelitian. Serta dapat berupa jurnal, skripsi maupaun laporan-laporan terkait yang menunjang dalam penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan

data yang didapatkan dari lapangan penelitian yang kemudian akan dilakukan proses sinkronisasi data, klasifikasi data, tabulasi data, serta interpretasi data yang kemudian akan mendapatkan kesimpulan sehingga dapat menjawab masalah yang akan diteliti.